



---

**Islamisasi di Bumi Etam: Transformasi Politik, Agama dan Budaya Masyarakat Kutai**Muhammad Azmi<sup>1</sup><sup>1</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

---

**ARTICLE INFO***Article history:*Received  
25 Mei 2021Accepted  
12 Nopember 2021Available online  
31 Januari 2022*Kata Kunci:*Islam, Kalimantan Timur,  
Erau, Beraja Niti, Panji  
Selaten, Salasilah Kutai*Keywords:*Islam, East Kalimantan,  
Erau, Beraja Niti, Panji  
Selaten, Kutai**ABSTRAK**

Islam entered Kutai brought by preachers from Makassar. This paper is a literature review of several previous studies. The results showed that Islam contributed to the transformation in politics, religion, and culture in the Kutai community. This transformation can be seen in replacing the term king with Sultan as stated in the Salasilah Kutai. In religion, transformation can be seen in Islamic sharia law as the legal basis for the Sultanate of Kutai as stipulated in the Beraja Niti and Panji Selaten Laws. The transformation in the cultural field can be seen in the implementation of the Erau Ceremony, which has been adapted to Islamic law.

**ABSTRACT**

Islam masuk ke Kutai dibawa oleh para mubaligh dari Makassar. Tulisan ini merupakan kajian literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam memberikan kontribusi dalam transformasi di bidang politik, agama dan budaya pada masyarakat Kutai. Transformasi tersebut dapat dilihat pada penggantian istilah raja menjadi Sultan sebagaimana termaktub dalam Salasilah Kutai. Di bidang agama, transformasi terlihat pada penggunaan hukum syariat Islam sebagai dasar hukum Kesultanan Kutai sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Beraja Niti dan Panji Selaten. Adapun transformasi bidang budaya terlihat pada pelaksanaan Upacara Erau yang sudah disesuaikan dengan syariat Islam.

**How to cite:**

Nur, M.M., Azmi, M., Abidin, S. (2021). Sejarah Konservasi Pesut Mahakam Di Desa Pela Kabupaten Kutai Kartanegara 1970-2020. *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 91-105.

---

<sup>1</sup> Corresponding author.E-mail addresses: [azmi@fkip.unmul.ac.id](mailto:azmi@fkip.unmul.ac.id)

## PENDAHULUAN

Islam Nusantara berbeda dengan Islam di berbagai peradaban lain, seperti Arabia, Turki, Persia, Afrika dan India. Perbedaan tersebut dikarenakan tiga hal. Pertama, penyebaran Islam di berbagai wilayah di Nusantara berlangsung secara damai - meminjam istilah T.W. Arnold adalah *penetration pacifique*. Kedua, Islam pertama kali disebarkan melalui jalur sufi agar dapat diterima secara terbuka, kemudian barulah diajarkan dari sudut pandang fikih. Ketiga, pada umumnya masyarakat Nusantara adalah masyarakat pesisir yang bergantung pada perdagangan antar pulau dan antar benua, sedangkan masyarakat pedalaman merupakan masyarakat agraris yang bergantung pada pertanian (Azra & Burhanudin, 2010: 1-2).

Kedatangan Islam ke Nusantara berbarengan dengan melemahnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Seiring dengan melemahnya kekuasaan Majapahit terhadap daerah taklukannya di luar Jawa, maka beberapa daerah mulai memisahkan diri. Hal ini dikarenakan berbagai perpecahan di dalam istana dan kematian Patih Gajah Mada (Azmi, 2017). Sebagai contoh, Sriwijaya setelah memisahkan diri dari Majapahit pecah menjadi tiga, yakni Palembang, Dharmacraya, dan Pagaruyung. Selain itu, Tanjungpura yang ada di bagian Barat Pulau Kalimantan melakukan perdangangan bebas dengan pedagang Cina. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Majapahit di luar Jawa sudah tidak diperhitungkan lagi. Dengan demikian, ikatan antara Majapahit dengan daerah taklukan mulai ditinggalkan (Daliman, 2012: 24)

Lemahnya pengaruh Hindu-Buddha yang ditandai dengan pudarnya pengaruh Sriwijaya dan Majapahit merupakan kesempatan dalam penyebaran agama Islam. Para mubalig mendapatkan kesempatan yang sangat lebar dalam menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah di Nusantara. Penyebaran Islam ditandai dengan berdirinya Kesultanan Samudera Pasai sebagai bentuk legitimasi kekuasaan Islam di pantai utara Sumatera. Penyebaran Islam ini kemudian sampai ke berbagai daerah di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, tak terkecuali sampai kepada masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan, yaitu masyarakat Kutai.

Kutai sejatinya merupakan sebutan bagi kawasan ditemukannya Prasasti Yupa. Nama tersebut disebutkan oleh peneliti Belanda yang berlokasi di sekitar Muarakaman, Kalimantan Timur. Istilah Kutai mulai mengalami perluasan makna menjadi Suku Kutai, Urang Kutai, dan Dayak Kutai. Suku Kutai merujuk pada salah satu dari rumpun Suku Dayak Ot Danum

yang mendiami wilayah Kalimantan Timur. Istilah Kutai sebagai sebutan suku muncul sebagai akibat dari kepentingan politik penguasa dan dikotomi agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian pustaka terhadap beberapa jenis literatur, seperti buku sejarah lokal, hasil penelitian sejarah lokal, dan artikel terkait. Sumber utama dalam kajian ini adalah Salasilah Kutai dan beberapa literatur relevan yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Islamisasi di Bumi Etam**

Masuknya Islam ke wilayah Kerajaan Kutai tidak dapat dipastikan. Berdasarkan Hikayat Kutai, Islam mulai masuk ke Kerajaan Kutai pada masa Raja Mahkota (1525-1600) yang dibawa oleh dua mubalig asal Minangkabau, yaitu Dato ri Bandang dan Tunggang Parangan (Azra dan Burhanudin, 2010). Kedatangan kedua mubalig ini setelah terlebih dahulu mengislamkan Makassar. Cerita tentang kedua mubalig ini disebutkah khusus dalam Salasilah Kutai pada bab XXVII dan XVIII.

Dalam Salasilah Kutai pada Bab XXVI disebutkan tentang kepercayaan masyarakat Kutai tentang benda-benda alam mempunyai kekuatan gaib yang dapat menentukan baik dan buruk bagi manusia. Cerita menyebar sampai ke Dato ri Badang dan Tunggang Parangan ketika masih berada di Makassar. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk berkewajiban dalam menyebarkan dan mengislamkan masyarakat Kutai setelah mengislamkan Bugis dan Makassar.

Pada Bab XVII, disebutkan bahwa kedatangan Dato ri Bandang dan Tunggang Parangan menunggang seekor hiu parang dari laut lepas menuju negeri Jaitan Layan. Mereka berpakaian jubah putih dengan surban hijau dengan tangan memegang tasbih. Kedatangan kedua mubalig ini menimbulkan kehebohan bagi masyarakat negeri tersebut. Kehebohan tersebut disebabkan ikan hiu parang dikenal sebagai ikan buas dapat dijinakkan dan dijadikan kendaraan tunggangan di lautan lepas. Kedatangan mereka kemudian menimbulkan keresahan di lingkungan kerajaan. Namun, sang raja tetap menerima kedatangan mereka dengan membuka pintu gapura dan meminta menuju Paseban Agung.

Dalam pertemuan tersebut, Tunggang Parangan menjadi juru bicara dalam rangka menyebarkan agama islam di kalangan elit Kerajaan Kutai Kertanegara. Tuan Parangan menyampaikan bahwa Islam adalah sebuah agama bagi seluruh umat manusia ketika ditanya oleh raja tentang agama Islam.

*“Agama Islam adalah peraturan untuk segala manusia di dunia ini, agar terhindar dari kesesatan, dan supaya dapat mencapai kedamaian, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan, aman, sentosa, berbahagia dan tinggi kedudukannya di dunia dan di akhirat kelak”*

*Dalam pertanyaan selanjutnya, Raja Makota menyampaikan bahwa masyarakat Kutai Kertanegara tidaklah kekurangan apapun. Mereka hidup damai, aman, sentosa dan berbahagia. Mereka hidup layak meskipun tanpa memeluk Islam. Kemudian, muncullah suatu pertanyaan dari benar Raja Makota yang menjadi pemicu dialog awal terkait keutamaan dalam memeluk islam bagi masyarakat Kutai. Tunggang Parangan pun dengan sabar menjawab pertanyaan Raja Makota dengan lugas dan penuh makna (Adham, 1981).*

*“Kemuliaan yang ada pada Aji sekarang datangnya dari Allah bukan dari dewa-dewa. Demikian juga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kutai Kertanegara, juga atas kehendak Allah. Tapi untuk mengejar kebahagiaan itu harus setiap orang berusaha. Hasil daripada usaha manusia itu akan berbeda-beda, karena kodrat tiap orang sudah ditentukan Allah berbeda-beda, tidak sama bagi setiap orang. Allah inilah yang disembah oleh pemeluk agama Islam, bukan dewa-dewa. Dewa-dewa tidak memiliki kekuasaan mutlak, karena kekuasaan terbagi-bagi untuk tiap-tiap Dewa. Kalau Allah hanya tunggal seluruh kekuasaan ada padaNya. Kekuasaan yang ada pada manusia hanya pinjaman saja dari Allah. Allah saja yang mempunyai hak atas kekuasaan itu pada diri manusia. Pada suatu saat Dia akan mengambil kekuasaan itu pada diri manusia. Misalnya Raja-raja Kutai Kertanegara yang terdahulu dari Aji, bilamana dia mangkat, maka dia tidak kuasa lagi untuk bergerak, tidak kuasa lagi untuk memakai pancainderanya, tidak kuasa lagi untuk merasakan mana manis, mana asin, mana pahit, tidak kuasa lagi untuk bernafas, tidak mempunyai kehendak lagi, tidak mempunyai kebesaran lagi untuk memerintah dan mengayomi rakyat.*

*Malah tidak kuasa lagi untuk mempertahankan namanya sendiri. Bukankah Aji Batara Agung sesudah meninggal dikenal dengan nama Dewa Mangkat? Bukankah pula sesudah Aji Paduka Nira meninggal orang-orang menyebutnya kemudian dengan nama Aji Didalam Tajau? Demikianlah seterusnya sesudah mangkat nama Raja-raja Kutai itu turut tertanam dengan jenazahnya di dalam guci, dan diberi gelar yang lain. Maharaja Sultan diberi gelar Aji di Rubian, Aji Mardansyah diberi gelar Aji Rubian Muda dan Pangeran Tumenggung Bayaya diberi glar Pangeran Rubian Anum”*

Dalam jawaban Tuan Tunggang Parangan tersebut terdapat setidaknya tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jawaban tersebut menggunakan pendekatan monoteisme dan menafikan politeisme. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kalimat “Allah hanya tunggal” dan “Dewa-dewa tidak memiliki kekuasaan mutlak”. Penggunaan berbagai kalimat bernada ketuhanan tersebut secara tidak langsung mencoba untuk menolak keberadaan kekuasaan raja, baik kekuasaan mutlak raja maupun raja sebagai anak dewata.

Kedua, jawaban tersebut menggunakan pendekatan yang memanfaatkan pengetahuan masyarakat Kutai. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan analogi mangkatnya raja-raja Kutai Kertanegara dan diberi gelar setelah mereka meninggal, serta kehilangan berbagai

kekuasaannya setelah mangkat. Penggunaan berbagai konteks yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kutai sangat berdampak pada kemudahan dalam pemahaman konteks pembicaraan.

Ketiga, penggunaan berbagai pengetahuan lokal dalam penyampaian Islam dalam narasi jawaban tersebut menunjukkan bahwa Tunggang Parangan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait agama dan pengetahuan lokal. Tak dapat dipungkiri pemahamannya dalam pengetahuan agama, karena memang merupakan mubalig. Namun, pemahamannya terkait pengetahuan masyarakat lokal justru menjadi pertanyaan tersendiri. Jikalau memang memiliki pemahaman yang mumpuni terkait silsilah raja Kutai Kertanegara, maka kemungkinan pengetahuan tersebut didapat ketika menyebarkan Islam di Makassar.

Dalam Salasilah Kutai pada Bab XXVIII disebutkan bahwa Raja Makota (Mahkota) merupakan raja Kutai pertama yang memeluk agama Islam setelah beradu kesaktian dengan Tunggang Parangan.

*“Pelajaran tentang islam di kalangan elit Kerajaan Kutai Kertanegara yang dilakukan oleh Tuan Tunggang Parangan adalah kajian tauhid, tata cara shalat (sembahyang), sirah nabawiyah, rukun islam, dan rukun iman. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari di langgar. Setelah semua daerah di bawah taklukkan Kutai Kertanegara memeluk Islam, Raja Makota kemudian menyebarkan islam ke berbagai daerah di luar kekuasaannya. Ke daerah hulu, islam disebarkan ke daerah Lua Bakung, ke daerah pantai disebarkan ke Kaniungan, Manubar, Sangkulirang sampai ke Balikpapan (Adham, 1981).*

Berdasarkan uraian di atas, pola islamisasi yang terjadi di Kerajaan Kutai Kertanegara adalah top-down. Dalam artian, Islam dipeluk dan diajarkan terlebih dahulu kepada kaum elit, yang kemudian dilanjutkan dengan pengajaran kepada rakyat melalui titah raja. Hal ini menunjukkan bahawa penyebaran Islam Nusantara dilakukan secara damai atau dalam istilah T.W. Arnold adalah *penetration pacifique* (Azra dan Burhanudin, 2010).

Pola islamisasi tersebut juga terjadi di daerah Kalimantan Selatan dengan perjanjian Pangeran Samudera masuk Islam apabila Demak membantu dan memenangkan peperangan melawan pamannya, Pangeran Tumenggung. Alhasil, perang dimenangkan dan Pangeran Samudera memeluk islam dan berganti nama menjadi Sultan Suriansyah yang kemudian menjadi raja pertama Kesultanan Banjar (Ideham, 2003).

### **Pengaruh Islam di Kerajaan Kutai Kertanegara**

Istilah Kutai pada awalnya merujuk pada daerah yang menjadi pusat Kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Pada periode selanjutnya, terdapat dua penamaan yang identik dengan Kutai sebagai sebuah bentuk pemerintahan, yaitu Kerajaan Kutai Ing Martapura di Muarakaman dan Kerajaan Kutai Kertanegara di Kutai Lama (RI, 1953)

Penaklukan Kerajaan Kutai Ing Martapura oleh Kerajaan Kutai Kertanegara dilakukan oleh raja kedelapan, yaitu Pangeran Sinum Panji Mendapa. Setelah penaklukan dan berhasil menghabisi garis keturunan terakhir Kerajaan Kutai Ing Martapura dan mengislamkan masyarakatnya, Pangeran Sinum Panji Mendapa menambahkan gelar di bagian akhir menjadi Pangeran Sinum Panji Mendapa Ing Martapura (Wetik, 2004). Penambahan gelar ini berlangsung sampai raja ketiga belas, yaitu Pangeran Anum Panji Mendapa ing Martapura. Dimulai dari raja keempat belas, gelar raja mulai diganti dengan istilah sultan yang menunjukkan kerajaan bercorak Islam. Istilah ini dimulai dari Sultan Aji Muhammad Idris yang menjabat pada 1755-1778 M (Adham, 1981).

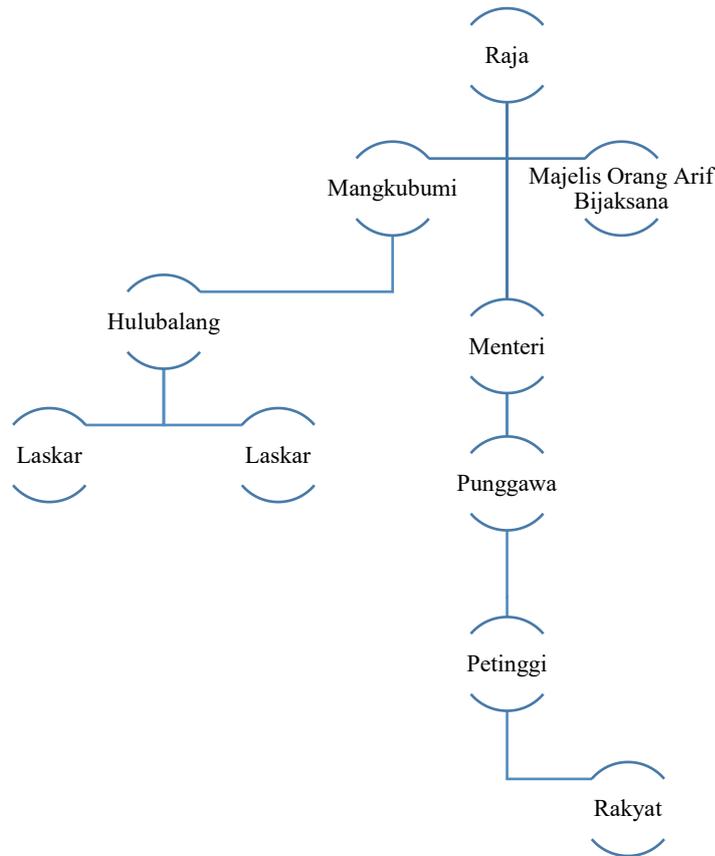
Pengaruh Islam dalam masyarakat Kutai dapat dilihat dari sudut pandang politik, agama, dan budaya. Dalam praktek politik, Kerajaan Kutai Kertanegara tercatat pernah mengeluarkan undang-undang berlandaskan Islam, yaitu Panji Selaten dan Beraja Niti. Kedua undang-undang tersebut merupakan dasar hukum Islam di Tanah Kutai. Panji Selaten berisi terkait struktur pemerintahan dan kedudukannya dalam Islam. Adapun Beraja Niti berisi aturan hukum pidana yang berlandaskan pada fiqih bab jinayat (hukuman). Corak Islam sangat jelas terlihat dari penggunaan kata syarak, kafir, khalifah Allah dalam Beraja Niti, sedangkan terjemahan ayat Al Quran dan hadits digunakan dalam Panji Selaten.

Undang-undang Panji Selaten terdiri dari 39 pasal dan Undang-undang Beraja Niti memuat 164 pasal peraturan. Kedua undang-undang ini mulai diberlakukan setelah terbentuknya Kerajaan Kutai Kertanegara ing Matapura pada masa pemerintahan Aji Pengeran Sinum Panji Mendapa sekitar tahun 1605 (Amin, Abbas, dan Soetoen, 1979: 66). Pasal dalam Undang-undang Panji Selaten dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu dasar negara, organisasi pemerintahan dan sifat pemerintahan. Pada bagian awal, tepatnya pada Pasal 1 dijabarkan bentuk dasar negara Kutai Kertanegara ing Martapura.

“Yang bernama kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura ialah yang Beraja, Bermenteri, berorang besar, berhulubalang, berhukum dengan adatnya, bersyak Islam dengan alim ulamanya. Yang berpongawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bermenteri dan teluk rantaunya berpanglima angkatan perbalanya”

Organisasi pemerintahan pada masa Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura ditandai dengan dominasi struktur pemerintahan pusat yang dipimpin sendiri oleh raja. Raja dibantu oleh mangkubumi, majelis orang-orang bijaksana dan menteri untuk menjalankan pemerintahan secara efektif. Di bawah menteri terdapat hulubalang/senopati yang membawahi lasykar yang bertugas menjaga keamanan. Raja juga menempatkan Punggawa yang merupakan pemimpin pemerintahan dalam wilayah yang lebih kecil. Para Punggawa

membawahi beberapa petinggi (kepala kampung) yang memerintah dalam wilayah masing-masing.



Bagan 1. Organisasi Pemerintahan Kutai Kertanegara ing Martapura  
Disadur dari Amin, Abbas, and Soetoen: 68.

Pembahasan terkait organisasi pemerintahan dalam Undang-undang Panji Selaten dimulai dari Pasal 14-16 tentang kekuasaan raja. Kemudian dilanjutkan dengan tugas menteri dan punggawa dalam pasal 17-18. Adapun tugas hulubalang dijabarkan dalam pasal 21. Adapun pembahasan terkait sifat pemerintahan dibahas mulai dari pasal 22 sampai 39. Dalam beberapa pasal ini dijabarkan beberapa hal, meliputi syarat menjadi raja, kedudukan istri raja, kedudukan raja dalam adat, kewajiban raja dan hak konstitusional seorang raja (Amin, Abbas, and Soetoen, loc.cit: 136-141. Kitab Undang-Undang Dasar Panji Selaten merefleksikan sentralisasi politik kerajaan dengan "sistem nilai pusat" dan "sistem kelembagaan pusat" masyarakat yang disahkan oleh sistem nilai tersebut. Disebut "nilai pusat" dikarenakan hubungan dekat dengan apa yang diyakini masyarakat sebagai sakral; dan dikatakan "kelembagaan pusat" karena didukung oleh pejabat-pejabat yang berkuasa dalam masyarakat (Sani, 2016).

Raja merupakan tokoh sentral dalam lingkaran kekuasaan Kerajaan Kutai Kertanegara. Raja memiliki berbagai hal prerogratif dalam menetapkan suatu keputusan. Tidak heran jika dalam Panji Selatan Pasal 27 disebutkan bahwa raja harus tunduk pada peraturan-peraturan yang bertujuan untuk meninggikan martabat raja. Narasi dalam pasal tersebut bersifat larangan, yaitu larangan meringankan dirinya, larangan duduk di sembarang tempat, larangan berjalan di sembarang jalan, dan larangan makan sembarangan. Keempat larangan tersebut seyogyanya bertujuan untuk menjaga martabat dan keamanan raja. Larangan meringankan diri misalnya, dapat diartikan bahwa raja tidak boleh meringankan hukuman bagi diri dan keluarganya, karena harus bersifat adil kepada siapapun. Adapun larangan duduk, berjalan dan makan di sembarang tempat bertujuan untuk menjaga keamanan sang raja dari hal yang tidak diinginkan, misalkan percobaan pembunuhan di jalan atau menggunakan racun.

Adapun Mangkubumi memegang peranan penting dalam mempertahankan eksistensi kerajaan. Dalam pasal 21, disebutkan bahwa mangkubumi merupakan pengganti kata dari raja saat susah maupun senang. Orang yang dapat dipercaya pada saat keadaan darurat, baik dikarenakan sang raja tidak dapat berada di singgasananya untuk menjalankan roda pemerintahan atau karena usia putra mahkota masih tergolong di bawah umur. Jabatan ini biasanya dipegang oleh figur senior terpercaya memiliki pengetahuan dan wawasan berkenaan dengan masalah kemasyarakatan dan pemerintahan kerajaan. Jabatan ini biasanya diisi oleh seorang kerabat atau bangsawan yang biasanya memiliki hubungan kerabat dekat dengan raja.

Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara, terdapat Majelis Orang-orang Bijaksana. Anggota dari majelis ini biasanya terdiri dari tokoh kaum bangsawan, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pula dari golongan masyarakat menengah (bergelar Awang) dengan syarat memiliki pemahaman yang baik terhadap seluk-beluk adat-istiadat orang Kutai. Majelis ini memiliki posisi yang sangat penting karena bertugas untuk menetapkan peraturan atau hukum yang berlaku di seluruh kerajaan atas persetujuan raja. Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis ini dikategorikan sebagai adat yang diadatkan.

Peran menteri dan punggawa dalam lingkaran kekuasaan Kerajaan Kutai Kertanegara dijelaskan pada pasal 17 dan 18. Kekuasaan keduanya adalah menjalankan adat, memutuskan hukum, adat yang diadatkan. Posisi keduanya disebutkan sebagai betis raja. Secara sederhana, menteri berperan sebagai mediator antara raja, mangkubumi dengan punggawa, petinggi dan rakyat dalam wilayah kerajaan. Menjalankan sabda dan titah raja. Adapun secara detail tugas menteri adalah (1) melaksanakan perintah raja dan mangkubumi, (2) memberikan nasihat kepada raja pada waktu-waktu raja menjalankan tugasnya melaksanakan hukum adat, (3)

bersama-sama dengan senopati dan ponggawa menjaga agar hukum dan adat tetap berjalan sebagai pegangan bagi pemerintah kerajaan, (4) dalam melaksanakan tugas-tugasnya, menteri harus berlaku adil. (5) melaksanakan hukum penting bagi para hulubalang (senopati) yang melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap kerajaan.

Adapun ponggawa memiliki peranan yang sama dengan menteri, tetapi dalam hirarki yang berbeda. Punggawa merupakan seorang kepala wilayah dari beberapa kampung. Tugas utama ponggawa adalah menjaga ketentraman dan menegakkan hukum adat di masyarakat. Kedudukan ponggawa berada di bawah menteri, sehingga seorang ponggawa dapat melaporkan berbagai hal terjadi di lapangan kepada menteri. Punggawa adalah orang pilihan yang diangkat karena memiliki jasa terhadap kerajaan.

Tugas utama hulubalang, panglima (senopati) dijelaskan dalam pasal 21, yaitu menaati adat yang diadatkan, menjunjung titah daulat raja dan menjaga keamanan dari segala rusuh. Mereka bertindak sebagai alat di dalam negeri. Ibarat keris kepada adat dan menjadi cakra bagi raja. Mereka digambarkan bertangan raja, berkaki adat, bersenjata tubuh dan berhati macan. Posisi hulubalang, panglima (senopati) merupakan aparat kerajaan yang melindungi seluruh masyarakat Kutai Kertanegara.

Adapun petinggi bertindak sebagai kepala kampung dalam suatu wilayah paling kecil. Mereka bertugas sebagai mediator antara raja dan rakyatnya. Mereka merupakan perpanjangan tangan raja di setiap kampung. Kinerja kerajaan sangat dipengaruhi oleh kinerja para petinggi. Oleh karena itu, mereka yang memenuhi syarat menjadi kepala kampung adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki loyalitas dan berjasa pada kerajaan. Dikarenakan pentingnya peranan kepala kampung dalam kemajuan kerajaan, maka raja biasanya akan memberikan gelar kepada kepala kampung yang berprestasi, terutama pada saat penyelenggaraan Upacara Erau.

Adapun Undang-undang Beraja Niti terdiri dari 164 pasal yang setidaknya dapat dibagi menjadi dua belas tema, yakni:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. kedudukan dan keadilan raja           | 7. hutang                     |
| 2. pencurian, perampasan, dan pembunuhan | 8. penemuan harta karun       |
| 3. pengrusakan tanaman dan hewan ternak  | 9. kemerdekaan budak          |
| 4. tidak membayar zakat                  | 10. perniagaan                |
| 5. perjudian                             | 11. etika suami istri         |
| 6. harta warisan                         | 12. pernikahan dan perceraian |

Dalam praktek keagamaan, terdapat akulturasi budaya Hindu dan Islam yang sangat kental di masyarakat Kutai. Inilah yang disebut dengan sinkretisme yang menjadi adat-istiadat masyarakat Melayu di Kalimantan. Kenduri merupakan upacara Hindu yang tercatat pernah dilakukan oleh Raja Mulawarman dalam Prasasti Yupa. Dalam budaya Kutai, seiring dengan perkembangan agama Islam, kenduri bertransformasi menjadi selamatan yang bertujuan untuk memohon keberkahan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam upacara kematian, terdapat istilah maniga hari, manujuh hari, maampat puluh, manyaratus, dan mahaul yang bertujuan untuk memanjatkan doa kepada yang sudah meninggal. Budaya ini lazim berkembang pada masyarakat Melayu di Kalimantan yang merupakan akulturasi dari tradisi Hindu. Pada masa Raja Makota, pada mulanya didirikan langgar di wilayah kerajaan yang menjadi lokasi pengajaran Islam bagi kaum elit. Seiring dengan kewajiban dalam penyebaran islam, maka langgar didirikan pula di kampung sebagai pusat pengajaran agama Islam.

Masyarakat Kalimantan pada dasarnya memiliki tradisi lisan yang lebih kuat dibandingkan tradisi tulisan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tradisi lisan yang berkembang masyarakat. Bahkan, masyarakat Kalimantan tidak memiliki aksara sendiri sebagaimana yang ada masyarakat di pulau lain, sebut saja masyarakat di Pulau Jawa dengan Aksara Jawa Kuno. Hal inilah yang menyebabkan tradisi tulisan di daerah Kalimantan sangat sedikit. Namun, dengan datangnya Islam di lingkungan elit, memberikan dampak yang signifikan terhadap tradisi tulisan di wilayah Kalimantan. Pada masa islam, kerajaan di wilayah Kalimantan menggunakan aksara Arab-Melayu sebagai bahasa komunikasi universal dengan kerajaan lainnya di Nusantara.

Dalam praktek budaya, transformasi budaya masyarakat Kutai Kertanegara dapat dilihat dalam upacara adat Erau. Erau merupakan budaya yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat Kutai. Pada mulanya, Erau merupakan suatu hajatan besar bagi Kerajaan Kutai dan seluruh masyarakat di bawahnya yang dilangsungkan selama 40 hari 40 malam. Saat itu, masyarakat Kutai mempersembahkan makanan, ternak, buah-buahan, seniman dan berbagai buah tangan sebagai wujud rasa syukur. Dalam Erau juga terwakili rasa terima kasih dari Raja Kutai Kartanegara kepada masyarakat yang tulus mengabdikan pada kerajaan.

Pada mulanya upacara adat ini disebut sebagai upacara tajak tanah dan mandi ke tepian yang dilakukan oleh pendiri Kerajaan Kutai Kertanegara, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dalam upacara tersebut terdapat prosesi tajak kepala yang membutuhkan kepala manusia dan kepala hewan.

*“Bilamana engkau ingin memandikan anak ini, maka janganlah dengan air biasa, akan tetapi dengan air yang diberi bunga wangi. Dan bilamana anakmu sudah besar, janganlah ia menginjak tanah, sebelum diadakan erau (pesta). Pada waktu erau itu kaki anakmu. ini harus diinjakkan pada kepala manusia yang masih hidup dan pada kepala manusia yang sudah mati. Selain daripada itu kaki anakmu ini harus injakkan pula pada kepala kerbau hidup dan kepala kerbau mati. Demikian pula bilamana anak ini untuk pertama kalinya ingin mandi ke tepian, maka hendaklah engkau adakan terlebih dahulu upacara erau (pesta) sebagaimana upacara pada "tajak tanah"*

Pada periode selanjutnya, istilah Erau kemudian merujuk pada upacara penobatan raja baru Kutai Kertanegara sebagaimana yang diadakan pertama kali dalam penobatan Aji Batara Agung Paduka Nira. Upacara penobatan ini dilaksanakan selama empat puluh hari empat puluh malam dengan menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman. Dalam rangka memenuhi kebutuhan makanan, berbagai macam jenis ternak dipotong, seperti kerbau, sapi, kijang, menjangan, angsa, itik dan babi.

Upacara Erau sebagai penobatan raja selanjutnya dilaksanakan pada masa Maharaja Sultan. Dalam upacara ini, terdapat tahapan yang lebih ringkas dan tertib. Upacara pada masa ini dilaksanakan selama delapan hari. Upacara Hari Pertama disebut dengan menjamu benua (kota). Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengundang dan memohon restu kepada Sang Hyang-hyang (dewa-dewa) yang jumlahnya tiga puluh tujuh berada di kayangan bertugas mengatur kehidupan manusia di bumi. Pada hari kedua, pada malam hari diadakan upacara yang disebut "Beredar". Orang-orang Belian beserta seluruh Pangkon dengan diikuti oleh seorang Kepala Adat berjalan keliling ruangan dalam Kenatan sebanyak tujuh putaran dengan berpakaian adat.

Pada hari ketiga diadakan upacara "mendirikan Ayu". Alat-alat Ayu ini diletakkan di atas butiran-butiran beras yang sudah diwamai dengan bermacam-macam wama, yang disebut dengan "Beras Tambak Karang". Sebagai pelengkap dari Beras Tambak Karang ini disediakan juga berbagai hiasan dari daun kelapa, daun enau, dan lain-lain. Pada malam harinya diadakan acara menjoget dan tarian ganjur. Sedang para undangan berjoget dan berganjur, Sang Raja menyelenggarakan upacara "Naik Ayu". Selesai upacara ini, Sang Raja menyaksikan upacara yang disebut "Gajah Rendu". Alat-alat yang dipergunakan untuk upacara ini dinamakan "rendu" dan "pancaran awan". Rendu dibuat dari daun beringin, sedangkan pancaran awan dibuat dari kain kuning berbentuk telabang. Selesai upacara "Gajah Rendu", seorang Petinggi pergi ke tepian Sungai Mahakam untuk mengambil "air tuli" dengan guci. Air tuli ini kemudian disimpan di ruangan upacara. Selanjutnya para

undangan dipersilakan untuk menari Kanjar, yang didahului oleh Sang Raja. Upacara ini diulangi selama 3 hari berikutnya, yaitu hari keempat, hari kelima dan hari keenam.

Pada Hari Ketujuh diadakan upacara mengambil air di Tanjung Riwana dengan iring-iringan kebesaran dikepalai oleh seorang Belian. Air dari Tanjung Riwana ini disatukan dengari "air tuli" yang disimpan di ruangan upacara. Setelah itu diadakanlah pesta semalam suntuk yang meriah diikuti oleh seluruh pria dan wanita yang hadir. Disediakan beras untuk dilemparkan satu sama lain sambil menari-nari. Acara meriah ini baru dihentikan menjelang fajar menyingsing yang kemudian disambung pula dengan upacara "menjala" sampai sinar fajar muncul.

Pada Hari Kedelapan diadakan upacara "Berjerak", yakni di atas kepala Sang Raja dilakukan penyembelihan ayam dan darahnya disebarkan di atas tanah. Inilah yang disebut "memelas bumi" dengan tujuan agar Negeri makmur, padi menjadi, tanaman subur, rakyat sejahtera. Setelah itu dilaksanakan upacara "Berumbari", yaitu sang Raja dikurung di dalam gulungan tilam dengan badan seluruhnya ditutup dengan kain kuning. Sang Raja mula-mula berbaring menghadap ke kiri, kemudian menghadap ke kanan dan terakhir berbaring telentang. Pada setiap posisi berbaring itu tubuh sang Raja dielus-elus dengan mayang bertundun tujuh kali dari kepala ke kaki dan tujuh kali pula dari kaki ke kepala. Terakhir sang Raja dimandikan di atas "Balai" di tepian sungai. Pada malam harinya sang Raja berpelas Tepung Tawar di atas Ayu dengan disaksikan oleh para undangan dan seluruh rakyat Kutai Kertanegara.

Upacara Erau berikutnya dilaksanakan pada saat penobatan Ki Dipati Jayaperana yang bergelar Pangeran Sinum Panji Mendapa. Upacara ini dilakukan selama empat puluh hari empat puluh malam.

*"Empat puluh hari empat puluh malam erau diadakan dengan berbagai keramaian. Dalam upacara tersebut dilakukan berbagai kegiatan, seperti beradu gasing, menyabung ayam jago, bertanding layang-layang, bahempas dan bermacam permainan ketangkasan diadakan. Menari ganjar dan ganjur, berjepen, bertingkilan, berdandang, dan lain-lain kesenian ditampilkan. Setelah genap empat puluh hari empat puluh malam, maka Ki Dipati Jayaperana diarak keliling alun-alun tiga kali. Sesudah itu dibawa masuk ke dalam paseban agung, didudukkan di singgasana. Doa dipanjatkan kepada Allah Taala agar Ki Dipati Jayaperana selalu dalam kandungan sehat wal afiat dan memerintah dengan adil dan makmur selalu meliputi rakyat dan negeri Kutai. Semua orang datang mengaturnakan sembah kepada Ki Dipati dari orang yang hina sampai kepada orang yang mulia, dari orang yang dungu sampai kepada orang yang cerdas .... Dengan pakaian yang lengkap Ki Dipati Jayaperana didudukkan di atas balai panca persada dengan dihadapi oleh sekalian pepangkon dalam. Pada saat itu Aji di Langgar mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa Ki Dipati Jayaperana dinobatkan menjadi Raja Kutai Kertanegara dan diberi gelar Pangeran Sinum Panji Mendapa" (Adham 1981).*

Pada masa Raja Makota, Upacara Erau dilaksanakan sebagai peringatan pernikahan. Pada saat itu, Raja Makota mempersunting Ratu Agung sebagai isteri. Upacara Erau dilaksanakan selama tujuh hari dengan menyelipkan tradisi islam di dalamnya, yaitu akad nikah dan pengucapan salawat.

*“Pada hari yang ditentukan itu meriam si Gantar Alam dan si Sapu Jagat dibunyikan. Raja. Makota dinaikkan ke atas perarakan, lalu diarak berkeliling alun-alun tiga kali dengan diiringi tempik sorak rakyat yang bergemba dan bunyi bedil yang diletuskan tiada hentinya. Kemudian Raja Makota dibawa ke langgar untuk melaksanakan akad nikah yang dilakukan oleh Tuan Tunggang Parangan. Setelah mengucapkan akad nikah, maka Tuan Tunggang Parangan meneriakkan salawat tiga kali yang mendapat sahutan ramai dari orang-orang yang menyaksikan upacara pernikahan ini. Raja Makota selanjutnya dibawa ke pasarean untuk didudukkan di atas puspa pembujangan di sebelah kanan Ratu Agung yang sudah menanti disana. Demikianlah, erau perkawinan berjalan seminggu lamanya. Pada hari yang ketujuh gong Gulung dibunyikan sebilgai tanda bahwa erau sudah berhenti.”*

Dalam naskah Salasilah Kutai disebutkan beberapa kali pelaksanaan Upacara Erau. Lama pelaksanaan upacara tersebut bervariasi yang dapat dibagi menjadi tiga durasi, yaitu tujuh hari, delapan hari dan empat puluh hari. Adapun tujuan pelaksanaan, upacara Erau setidaknya dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu sebagai peringatan menginjak tanah pertama kali (tajak tanah), sebagai upacara penobatan raja, dan sebagai pesta pernikahan. Semenjak kedatangan Islam, prosesi tajak kepala dihapuskan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam upacara erau diselipkan nafas islam yang menjadi rangkaian kegiatan, yaitu akad nikah dan pengucapan salawat sebagaimana yang terjadi pada saat upacara pernikahan Raja Makota dengan Ratu Agung.

Dalam prosesi Upacara Erau, terdapat beberapa kegiatan tambahan yang dilaksanakan sebagai bagian dari pesta. Beberapa kegiatan yang bertentangan dengan syariat islam, seperti menyabung ayam. Namun, kegiatan tetap dilaksanakan pada masa Aji di Langgar pada saat melaksanakan upacara penobatan Ki Dipati Jayaperana menjadi raja dengan gelar Pangeran Sinum. Panji Mendapa. Adapun proses lain, seperti mendirikan tiang ayu, batapung tawar, bapelas, belimbur, dan mengulur naga masih dilaksanakan sebagaimana biasanya, sebab tidak bertentangan dengan Islam.

*“Keesokan harinya meriam dan bedil dibunyikan, gong dipukul tidak putus-putusnya, gendang dipalu tidak henti-hentinya sebagai tanda sang raja hendak mengadakan erau karena Ki Dipati Jayaperana hendak dijenangkan sang ratu. Empat puluh hari empat puluh malam erau diadakan dengan berbagai keramaian. Beradu gasing, menyabung ayam jago, bertanding ayang-layang, bahempas dan bermacam permainan ketangkasan diadakan. Menari ganjar dan ganjur, berjepen, bertingkilan, berdandang, dan lain-lain kesenian ditampilkan.”*

Pada saat ini Upacara Erau dijadikan sebagai sebuah festival budaya yang menjadi kegiatan tahunan. Pada tahun 2013, Festival Erau dikaitkan dengan budaya internasional yaitu International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF). CIOFF merupakan lembaga Internasional di bawah naungan UNESCO. Dalam kegiatan ini tercatat ada beberapa delegasi datang dari 12 negara seperti Bulgaria, Polandia, India, dan Taiwan.

## **SIMPULAN**

Pengaruh Islam dalam masyarakat Kutai dapat dilihat dari sudut pandang politik, agama, dan budaya. Dalam praktek politik, Kerajaan Kutai Kertanegara tercatat pernah mengeluarkan undang-undang berlandaskan Islam, yaitu Panji Selaten dan Beraja Niti yang berisi aturan terkait struktur pemerintahan dan kedudukannya dalam Islam, serta aturan hukum pidana yang berlandaskan pada hukum fikih. Dalam praktek keagamaan, terdapat akulturasi budaya Hindu dan Islam yang sangat kental di masyarakat Kutai, seperti selamatan yang bertujuan untuk memohon keberkahan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dalam upacara kematian, terdapat istilah maniga hari, manjuh hari, maampat puluh, manyaratus, dan mahaul yang bertujuan untuk memanjatkan doa kepada yang sudah meninggal.

Adapun dari aspek budaya, Upacara Erau merupakan budaya yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat Kutai. Upacara adat ini merupakan upacara tajak tanah dan mandi ke tepian yang dilakukan oleh pendiri Kerajaan Kutai Kertanegara, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti. Dalam upacara tersebut terdapat prosesi tajak kepala yang membutuhkan kepala manusia dan kepala hewan. Namun, semenjak kedatangan Islam, prosesi dihapuskan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun prosesi lainnya, seperti mendirikan tiang ayu, batapung tawar, bapelas, belimbur, dan mengulur naga masih tetap dilaksanakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adham, D. 1981. Salasilah Kutai. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Amin, Asli, Badaranie Abbas, and Anwar Soetoe. 1979. Dari Swapraja Ke Kabupaten Kutai. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Azmi, M. (2017). Islam di Kalimantan Selatan pada Abad Ke-15 sampai Abad Ke-17. Yupa: Historical Studies Journal, 1(1), 38-47.
- Azra, Azyumardi, and Jajat Burhanudin. 2010. Indonesia Dalam Arus Sejarah: Kedatangan Dan Peradaban Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

- Daliman. 2012. *Islamisasi Dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ideham, M. Suriansyah. 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan.
- Kulke, Hermann. 1991. "Epigraphical References to the City and the State in Early Indonesia." *Indonesia Journal* 52:3–22.
- Muljana, Slamet. 2005. *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*. Yogyakarta: LKiS.
- Muljana, Slamet. 2009. *Tafsir Sejarah Negarakertagama*. Yogyakarta: LKiS.
- Munoz, Paul Michael. 2013. *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia Dan Semenanjung Malaysia*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, and Nugroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RI, Kementerian Penerangan. 1953. *Propinsi Kalimantan*. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.
- Sani, M. Yamin. 2016. "Erau: Ritual Politik Dan Kekuasaan." *Al-Qalam* 18(2):297–309.
- Sedyawati, Edi, and Hasan Djafar. 2010. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Kerajaan Hindu-Buddha*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Wetik, Fred. 2004. *Sejarah Perjuangan Sultan Aji Muhammad Idris Raja Kutai Kertanegara: Salah Satu Putera Terbaik Nusantara*. Kabupaten Kutai Kertanegara: KISIK dan Yayasan Lanjong.
- Zaini-Lajoubert, Monique. 2008. *Karya Lengkap Abdullah Bin Muhammad Al-Misri*. Jakarta: Ecole francaise d'Extreme-Orient dan Komunitas Bambu.